

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA LEMBAGA AMIL
ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 45 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA
(STUDY KASUS PADA BAITUL MAAL HIDAYATULLAH
SURABAYA)**

Fitriyah

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

M. Nizarul Alim

Rahmat Zuhdi

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Abstraksi: Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan jenis organisasi nirlaba yang bergerak dalam pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Fenomena pendistribusian ZIS dalam berbagai sumber dijelaskan bahwa dana zakat yang disalurkan melalui BAZ/LAZ masih belum optimal diantaranya baru mencapai sekitar 700 Milyar, jauh dibawah potensi zakat yang diperkirakan mencapai Rp. 2,9 trilyun. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat. Perlakuan akuntansi sangat penting dalam setiap entitas atau organisasi, terutama untuk melakukan pencatatan setiap terjadi transaksi. Hal ini untuk meningkatkan tingkat kredibilitas masyarakat terhadap organisasi agar mampu berkembang dikalangan masyarakat. Oleh karena itu sangat penting untuk meneliti bagaimana perlakuan akuntansi sebuah organisasi nirlaba agar laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang ada yaitu PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas publik saat dipublikasikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perlakuan akuntansi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya berdasarkan PSAK No.45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti pada satu objek dengan meneliti perlakuan akuntansinya saja yang meliputi: Measurement, Recognition dan Disclosure.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan study kasus. Adapun jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang berupa penjelasan serta format-format laporan keuangan. Data tersebut bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari lokasi objek melalui teknik pengamatan langsung serta wawancara. Disamping itu juga bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMH Surabaya sudah cukup memadai dan sudah mempunyai acuan yaitu diatur dalam kebijakan akuntansi yang telah dibuat dalam Forum Zakat (FOZ) dengan dasar akuntansi yang tetap mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan. Sementara Penyajian atau pengungkapan pelaporan keuangan BMH Surabaya periode 2007 hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (LSPD). Penyajian laporan posisi keuangan BMH Surabaya sudah cukup sesuai dengan PSAK No. 45, hanya saja penyajian aktiva bersih terikat maupun tidak terikat tidak dikenal dan yang ada hanya penyajian saldo dana. LSPD BMH Surabaya pada intinya merupakan laporan aktivitas, hanya saja penamaannya berbeda.

Kata kunci: perlakuan akuntansi, LAZ, PSAK No. 45, Organisasi Nirlaba

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Qardawi (1996: 86) dalam Ludigdo dan Marini (2003: 69) menjelaskan bahwa Zakat merupakan sesuatu yang azasi bagi umat islam, karena merupakan pemenuhan rukun islam. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dikatakan azasi oleh karena keberadaannya sangat fundamental bagi upaya pencapaian kondisi kehidupan yang lebih baik bagi individu yang berzakat maupun penerima zakat. Bagi individu yang berzakat, hartanya akan bertambah banyak, lebih berarti/ bermakna dan terlindungi dari kebinasaan (Qardawi 1996; 34-35). Selain itu jiwa orang yang berzakat akan menjadi bersih, demikian halnya hartanya. Sedangkan bagi penerima zakat tentunya akan bermanfaat untuk menutupi kekurangan sumber penghidupannya dan bahkan kemudian mengangkat martabat diri, keluarga dan masyarakatnya. Zakat dalam hal ini tentunya tidak terbatas hanya pada zakat *fitriah*, tetapi meliputi juga zakat *maal*. Demikian halnya situasi ketika berinfaq dan bershadaqah. *Infaq* dan *shodaqoh*. *Infaq* adalah penyerahan harta kepada pihak lain (orang maupun lembaga) untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan dalam luas dan dalam banyak hal dilakukan karena adanya permintaan dari pihak lain tersebut. *Shodaqoh* adalah penyerahan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan dan didorong oleh keinginan dari *musaddiqin*.

Qardawi (1991) dalam Syafei (2002: 577) menjelaskan bahwa meenurut firman Allah dalam Al-Qur'an surat At - taubah ayat 103 yang mendapat perintah untuk mengambil zakat ialah negara/pemerintah, dimana negara bertanggungjawab penuh atas pengumpulan, hingga pendistribusian zakat agar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya.

Untuk menjalankan tanggungjawabnya dalam membantu penerapan zakat, maka pemerintah mendirikan lembaga-lembaga zakat baik berupa Badan Amil Zakat (BAZ) maupun memberikan legalitas terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. LAZ merupakan sebuah lembaga yang mendapatkan amanah dari para pengeluar zakat (*Muzakki*) dalam menyalurkan kewajibannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*)

setelah mencapai batas *nishab*. Lembaga tersebut telah diberikan kepercayaan untuk mendistribusikan harta yang telah dikeluarkan *Muzakki* untuk didistribusikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan yang ditentukan dalam Alqur'an. Lembaga ini diharapkan dapat menggali potensi dan mendistribusikan dana ummat yang berupa Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) kepada kesejahteraan umat, namun hasilnya belum menggembirakan, walaupun sudah ada himbauan kepala negara.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan jenis organisasi nirlaba yang pelaporan keuangannya diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Dimana untuk pembuatan jenis laporan keuangannya meliputi : neraca, laporan aktivitas, dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

Disamping penggunaan akuntansi berfungsi sebagaimana tersebut di atas, akuntansi juga dapat dijadikan sebagai sebuah indikator untuk melihat kinerja suatu organisasi baik organisasi yang berorientasi pada laba maupun organisasi nirlaba. Dengan melihat bagaimana perlakuan akuntansinya maka dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukannya.

Syafei (2002: 579) menyebutkan bahwa ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan zakat:

1. Ada sebagian organisasi/kelompok umat islam yang enggan berpartisipasi aktif karena khawatir dengan adanya BAZ akan mengurangi jatah zakatnya bagi kepentingan organisasi ataupun kelompoknya.
2. Kekhawatiran para muzakki pada BAZ yang takut jika zakat yang diberikan tidak disalurkan kepada yang berhak, malah khawatir jika zakat dipergunakan sendiri oleh BAZ dan kelompoknya. Solusinya tentu saja harus ada bukti yang konkrit mengenai hasil zakat yang diberikan ataupun laporan secara berkala melalui media.
3. Jenis zakat yang diperoleh masih terbatas pada zakat fitrah, infaq ataupun shadaqah. Sedang zakat mal belum ditangani dengan baik.
4. Terjadinya *overlapping* penanganan atau pengumpulan zakat antara BAZ dengan organisasi atau panitia yang bertebaran di berbagai tempat dan kesempatan. Karena banyaknya permohonan ZIS, muzakki jadi enggan untuk memberi ZIS pada BAZ yang berbadan hukum dan memiliki tanda pengesahan (SK) dari pemerintah.
5. BAZ tidak mempunyai hak/otoritas untuk memaksa setiap muzakki menunaikan zakatnya. Tetapi dengan adanya UU No. 38/1999 serta peraturan pemerintah bahwa wajib zakat dapat mengurangi pembayaran PPh-nya sebesar 2,5 persen jika ada bukti pembayaran zakat dari BAZ atau Bank-Bank yang telah ditunjuk, di harapkan kesadaran umat islam semakin meningkat.
6. Belum adanya data yang akurat. Untuk ini BAZ harus menginventarisir data dengan baik, terutama mengenai: jumlah penduduk yang beragama islam, berapa telah membayar zakat setiap tahun, apakah penghasilan mereka telah mencapai nishab, berapa jumlah penduduk yang fakir miskin, berapa dana ZIS yang diperoleh setiap tahun, berapa dana yang telah dimanfaatkan, dan lain-lain.

Budiyanto (2006: 57) menjelaskan bahwa potensi zakat Indonesia di atas kertas luar biasa besar. Secara matematis, minimal akan kita dapatkan angka

sebesar Rp. 6,5 Trilyun pertahun. Belum lagi jika ditambahkan infaq, shadaqah, serta wakaf. Angka-angka tersebut barulah potensi, belum menjadi kenyataan. Kenyataannya saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp. 150 milyar pertahun (ini menurut data pengumpulan zakat oleh lembaga, baik BAZ maupun LAZ). Itu artinya hanya 2,3%.

Pengelolaan zakat secara profesional mendapatkan momentumnya pada Tahun 1999 setelah Undang-undang No.38/1999 ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, organisasi pengelola zakat resmi di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah (di tingkat Pusat, propinsi dan kabupaten/kota), Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat pengesahan dari pemerintah. Meskipun perkembangan pengelolaan Zakat terus menunjukkan kemajuan yang pesat, tetapi capaian yang ada saat ini sebenarnya masih jauh dari optimal. Dalam sebuah kesempatan disampaikan bahwa dana zakat yang disalurkan melalui BAZ/LAZ baru mencapai sekitar 700 Milyar, jauh dibawah potensi zakat yang diperkirakan mencapai Rp. 2,9 trilyun ([Http://www.nu.or.id](http://www.nu.or.id)) dalam Susanto dan Cahyadi (2008: 75).

Berdasarkan data tersebut perlu dipertanyakan sejauh mana Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Bagaimana kinerja dan akuntabilitasnya sebagai salah satu lembaga yang mengemban amanah dari para *Muzakki*. Apakah laporan pertanggungjawabannya dilakukan secara baik dan transparan kepada publik serta apakah perlakuan akuntansinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ada.

Perlakuan akuntansi sangat penting untuk diungkap dalam setiap entitas atau organisasi, terutama untuk mengetahui bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan bagaimana perusahaan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang terjadi, apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar akuntansi yang ada atau tidak. hal itu juga berlaku pada organisasi nirlaba. Hal tersebut tidak lepas dari adanya upaya untuk meningkatkan tingkat kredibilitas terhadap entitas atau organisasi agar mampu berkembang di kalangan masyarakat. Oleh karena itu sangat penting mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi sebuah organisasi nirlaba agar laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang ada yaitu PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas publik saat dipublikasikan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah tentang Bagaimana perlakuan akuntansi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah Surabaya berdasarkan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perlakuan akuntansi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah Surabaya berdasarkan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Organisasi Nirlaba

Definisi Organisasi Nirlaba

Anthony dan Young (1998: 49) dalam Cahyono et.,al (2002: 549) mendefinisikan organisasi nirlaba sebagai organisasi yang tujuannya adalah sesuatu di luar menerima keuntungan untuk para pemiliknya biasanya tujuannya adalah pemberi pelayanan. Dikemukakan Anthony dan Young (1998, 59) organisasi nirlaba tidak dapat memperoleh modal ekuitas dari para investor luar, kecuali modal ekuitas mereka didonasikan. Sebagai akibatnya, hubungan pertanggungjawaban organisasi dan individu-individu yang mendonasikan harta benda mereka kurang normal dan kurang terstruktur dibanding organisasi bisnis, ini bersifat komunal, meminjam istilah Laughin (1990). Berdasarkan pendapat tersebut maka pengertian organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitasnya untuk memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat bukan berorientasi untuk mencari keuntungan yang bersifat komersil.

Karakteristik dan Tujuan Organisasi Nirlaba

Dalam pendahuluan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 (2007) menyatakan bahwa Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari hutang, dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditor, dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya.

Adi Setiawan (2008) dalam [Http://www.bddn.org/index.php](http://www.bddn.org/index.php) menyebutkan bahwa Karakteristik dan tujuan dari organisasi non profit menjadi jelas terlihat ketika dibandingkan dengan organisasi profit. Organisasi non profit berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, sedangkan organisasi profit sesuai dengan namanya jelas-jelas bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi nonprofit menjadikan sumber daya manusia sebagai asset paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk manusia.

Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Definisi LAZ

Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Disamping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis ditengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administratif dan selanjutnya dikukuhkan oleh Pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Menurut Undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Syahatah (2004: 4) menjelaskan bahwa zakat mengandung makna *thaharah* (bersih), pertumbuhan dan barakah. dasar dari ini adalah firman Allah SWT. dalam QS. At-taubah: 103. Sedangkan makna zakat secara syar'i adalah: Bagian tertentu dari harta yang tertentu, dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.

Menurut Budiman (2002: 4) pengertian infaq merupakan asal kata dari nafaqa yang artinya menafkahkan dan membelanjakan bagi orang memberi belanja bagi keluarganya sama artinya dengan memberi nafkah, dan dalam hal memberi belanjanya itu disebut menginfaqkan. Dasuki, et, al (1993) dalam Budiman (2002: 5) menjelaskan pengertian *shadaqah* adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu; suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebijakan yang mengharapkan ridha Allah SWT dan pahala semata.

Syahatah (2004: 5) menyebutkan bahwa Zakat ada dua macam:

1. Zakat maal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Zakat badan atau zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada umat islam pada bulan ramadhan.

Wakaf

Menurut *musnad* Syafi'i dalam Sudarsono (2007: 259) wakaf diambil dari kata "*waqafa*", menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *Nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengann syari'at Islam. Harta yang diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik *Nadzir*, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat Umum.

Secara umum bentuk wakaf dapat dibedakan kedalam dua kategori berikut (A.A. Islahi, 1992) dalam Tohirin (2002: 493):

- a. Wakaf untuk manfaat individu dan keluarga yang disebut wakaf keluarga (*family waqf*).

- b. Wakaf untuk kepentingan umum dan kesejahteraan si miskin dan disebut wakaf publik (*Public Waqf*).

Perlakuan Akuntansi

Pengukuran (Measurement)

Suardjono (2006: 133-134) Pengukuran (*measurement*) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statement keuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah (kos) yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Berkaitan dengan hal ini misalnya ada bahwa kos aset tetap adalah semua pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Adnan (2005: 54), Aspek pengukuran memegang peranan penting dalam kaitannya dengan peran laporan akuntansi yang harus menyajikan data kuantitatif tentang posisi kekayaan perusahaan dalam suatu waktu tertentu. Yang perlu dipertimbangkan dalam aspek ini adalah atribut apa yang dipakai dalam pengukuran. Aspek pengukuran hampir tidak berbeda bila dibandingkan dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur *relevan, reliability, understandability, dan comparability*.

Pengakuan (Recognition)

Suardjono (2006: 195) menjelaskan secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statemen keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknik, pengakuan berarti pencatatan secara resmi (penjurnalan) suatu kuantitas (jumlah rupiah) hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam statement keuangan.

Kerangka konseptual harus menetapkan kriteria pengakuan umum (fundamental) untuk dijadikan dasar bagi penyusun standar untuk menentukan teknik atau prosedur pengakuan dalam bentuk standar akuntansi. Teknik pengakuan misalnya adalah bahwa penjualan diakui pada saat faktur disiapkan dan barang telah diserahkan kepada perusahaan ekspedisi. FASB menetapkan empat kriteria pengakuan fundamental (konseptual) sebagai berikut (SFAC No. 5, prg. 63):

Definisi (*definitions*)__ suatu pos harus memenuhi definisi elemen statemen keuangan.

Keterukuran (*measurability*)__ suatu pos harus mempunyai atribut yang berpaut dengan keputusan dan dapat diukur dengan tingkat keterandalan yang cukup.

Keberpautan (*relevance*)__ informasi yang dikandung suatu pos mempunyai daya untuk membuat perbedaan dalam keputusan pemakai.

Keterandalan (*reliability*)__ informasi yang dikandung suatu pos secara tepat menyimbolkan fenomena, teruji (terverifikasi), dan netral.

Pengungkapan (Disclosure)

Perlakuan akuntansi dapat diringkas sebagaimana dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.1
Pengertian *Measurement*, *Recognition* dan *Disclosure*

Pengukuran (<i>Measurement</i>)	Pengakuan (<i>Recognition</i>)	Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)
Penentuan jumlah rupiah objek (kos) yang dicatat pertama kali saat terjadi transaksi	Pencatatan atau penjurnalan jumlah rupiah (kos)	Cara pembeberan melalui statement keuangan

Sumber: Suwardjono (2006) diolah

Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45

Laporan Posisi Keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, serta aset bersih dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak-pihak lain untuk menilai (PSAK No.45, prg.10):

- (a) Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan
- (b) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aset, kewajiban, dan aset bersih (PSAK No.45, prg.11).

Klasifikasi aset dan kewajiban

Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam satu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, organisasi biasanya melaporkan masing-masing unsur aset dalam kelompok yang homogen (PSAK No.45, prg.12), seperti:

- (a) Kas dan setara kas
- (b) Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain:
- (c) Persediaan
- (d) Sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar dimuka:
- (e) Surat berharga/efek dan investasi jangka panjang:
- (f) Tanah, gudang, peralatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Kas atau aset yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang harus disajikan terpisah dan kas atau aset yang tidak terikat penggunaannya. Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut (PSAK No.45, prg.13):

- (a) Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo;
- (b) Mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban kedalam jangka pendek dan jangka panjang;
- (c) Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau aset jatuh temponya kewajiban, termasuk pembatasan penggunaan aset, pada catatan atas laporan keuangan.

Klasifikasi aset bersih dan tidak terikat

PSAK No. 45 paragraf 14-18 menyatakan Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

1. Pembatasan permanen terhadap (1) aset, seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (*endowment*).
2. Pembatasan temporer terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu di masa depan, atau (4) pemerolehan aset tetap, dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya.
3. Aset bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dan jasa penjualan barang, sumbangan dan dividen atau hasil investasi; dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akta pendirian dan dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditor, dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan Aktivitas

Tujuan laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai (a) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, (b) hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, serta (c) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak lainnya untuk (a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, (b) menilai upaya kemampuan dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, serta (c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer (PSAK No.45, prg.19).

Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset bersih selama satu periode. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aset bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan (PSAK No.45, prg.20).

Perubahan kelompok aset bersih

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam satu periode (PSAK No.45, prg.21).

Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian.

PSAK No.45, prg.23, 24 dan 25 menyatakan bahwa Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang dan menyajikan beban sebagai pengurang aset bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau kewajiban) sebagai penambah dan pengurang aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Informasi pendapatan dan beban

Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasehat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (PSAK No.45, prg.27).

Informasi pemberian jasa

PSAK No.45, prg.30-32 menyatakan bahwa laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut:

1. Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk membantu para penyumbang, kreditor, dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Disamping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, organisasi nirlaba juga dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan.
2. Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi organisasi. Pemberiaan jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama.
3. Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa umumnya, aktivitas pendukung meliputi aktivitas manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan anggota.

Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode (PSAK No.45, prg.33). Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK No.2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut ini (PSAK No.45, prg.34):

- (1) Aktivitas pendanaan :
 - a. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang
 - b. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi (*endowment*).
 - c. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
- (2) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas: sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Harahap (2004: 40) menjelaskan bahwa catatan ini merupakan penjelasan lebih rinci dari laporan keuangan informasi yang tidak dapat diungkapkan di batang tubuh laporan keuangan yang sangat terbatas itu dapat dimuat dalam bentuk catatan penjelasan laporan keuangan ini.

Tinjauan Terhadap Penelitian Sebelumnya

Penelitian sejenis sebelumnya pernah dilakukan oleh Damayanti (2004) tentang kinerja organisasi nirlaba dengan judul “ Penilaian Kinerja Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Study Kasus Pada Yayasan Dana Sosial Alfalah Surabaya)”. Dalam penelitiannya, peneliti mencoba mencari informasi tentang bagaimana PSAK No. 45 digunakan sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan dan dasar penilaian kinerja organisasi sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pelaporan keuangan objek yang diteliti sudah cukup memadai dan memiliki daya banding yang tinggi.

Penelitian tersebut lebih menekankan pada kinerja organisasi dengan melihat pada laporan keuangan berdasarkan PSAK No.45. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan terhadap perlakuan akuntansi yang didalamnya mencakup *measurement*, *recognition*, serta *disclosure* dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Moleong (2005: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Sementara penelitian dengan desain study kasus menurut Subiyanto (2000: 12) dilakukan dengan melakukan penelitian secara mendalam terhadap suatu objek penelitian yang dipilih dengan beberapa keadaan yang dianggapnya sama. Untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap suatu objek penelitian yang dipilih, sebagaimana dijelaskan oleh Subiyanto tersebut diatas, maka peneliti melakukan pengamatan langsung (survei) serta wawancara terhadap objek yang bersangkutan agar dapat memperoleh data yang detail.

Objek Penelitian

Organisasi Nirlaba yang dijadikan objek penelitian adalah Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. Peneliti mengambil objek tersebut karena pendistribusian dana di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya cukup besar, mendapat pengesahan dari pemerintah, memiliki data muzakki, dan memiliki program kerja yang jelas. Disamping itu lokasi objek cukup strategis dan mudah di jangkau yaitu berada di jalan Kertajaya Indah Timur 14A/17 Kompleks Pertokoan Mega Galaxy Surabaya.

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang berupa uraian ataupun penjelasan serta format-format laporan keuangan. Data tersebut bersumber dari data primer yang diperoleh langsung

dari lokasi objek melalui teknik pengamatan langsung serta wawancara. Disamping itu juga bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Setelah data-data yang diperlukan oleh peneliti diperoleh, maka langkah-langkah teknis untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis data-data yang sudah terkumpul terutama data tentang pelaporan keuangan mulai dari pengklasifikasian dan penempatan ke dalam pos-pos statemen keuangan, penilaian atau pengukuran (*measurement*), pengakuan (*recognition*), serta pengungkapan (*disclosure*).
2. Data-data yang ada khususnya data tentang pelaporan keuangan yang diterapkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang sudah ditentukan yaitu berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.
3. Menyimpulkan hasil analisis.

IV. PEMBAHASAN

Kebijakan Akuntansi Pada BMH Surabaya

Kebijakan akuntansi pada Baitul Maal Hidayatullah diatur dalam pedoman yang sudah ditetapkan diantaranya mengenai pengukuran, pengakuan dan penyajian atau pengungkapan. Kebijakan tersebut merupakan hasil keputusan dalam Forum Zakat (FOZ) yaitu organisasi para Lembaga Amil Zakat, tetapi dasar akuntansinya tetap mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Laporan keuangan pada BMH Surabaya disusun berdasarkan data akuntansi tahun bersangkutan dengan dasar standar akuntansi keuangan yang diterapkan secara konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya, serta peraturan/ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi perusahaan. Periode akuntansi BMH adalah 1 (satu) tahun fiskal dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Dalam Pedoman Kebijakan akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Komponen laporan keuangan secara umum meliputi:

1. Laporan keuangan pokok, terdiri dari:
 - 1) Laporan posisi keuangan
 - 2) Laporan Sumber dan penggunaan dana
 - 3) Laporan arus kas
 - 4) Catatan atas laporan keuangan
2. Laporan keuangan tambahan, terdiri dari:
 - 1) Laporan sumber dan penggunaan dana unit otonom.

Analisis Pelaporan Keuangan BMH Surabaya

Dalam kebijakan akuntansi, pada BMH Surabaya memang terdapat beberapa jenis laporan keuangan yaitu laporan keuangan utama dan laporan keuangan tambahan. Namun realisasinya Pelaporan keuangan pada Baitul Maal Hidayatullah dapat dilihat sebagai berikut.

Laporan Posisi Keuangan

Elemen-elemen (pos-pos) dalam laporan posisi keuangan organisasi nirlaba pada BMH Surabaya secara umum meliputi meliputi: Aktiva, kewajiban dan saldo dana.

Format laporan posisi keuangan pada BMH Surabaya dapat dilihat pada tabel 4.1 pada Lampiran.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (LSPD)

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana mencakup struktur OPZ secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah saldo dana selama suatu periode. Perubahan saldo dana dalam laporan sumber dan penggunaan dana selanjutnya tercermin pada saldo dana dalam laporan posisi keuangan.

Tujuan utama LSPD adalah menyediakan informasi mengenai:

- a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana
- b. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan
- c. Bagaimana penggunaan Sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Selain itu informasi dalam LSPD yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk:

- a. Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode
- b. Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan OPZ dalam memberikan jasa,
- c. Menilai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja manajemen OPZ.

Adapun format Laporan Sumber dan Penggunaan Dana pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya dapat dilihat pada tabel 4.2 pada Lampiran.

Perbandingan Pelaporan Keuangan Organisasi nirlaba menurut PSAK No. 45 Dengan Pelaporan Keuangan Pada BMH Surabaya

Analisis perbandingan pelaporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK No.45 dan BMH Surabaya dapat dilihat pada tabel 4.3 pada Lampiran.

Berdasarkan tabel 4.3 (Lampiran) maka dapat dilihat bahwa penyajian laporan posisi keuangan BMH Surabaya tidak jauh berbeda dengan yang ada pada PSAK No.45, yaitu menyajikan tentang informasi aset dan kewajiban, hanya saja perbedaannya adalah akun aktiva bersih terikat maupun tidak terikat tidak dikenal dan yang ada hanya akun saldo dana yang merupakan sumber pendapatan yang berasal dari sumbangan-sumbangan.

Adapun rincian masing-masing saldo dana yang menjelaskan sumber dan penggunaan dana untuk tiap akun dapat dilihat pada lampiran1 sampai lampiran 14 yang telah dilampirkan. Dalam lampiran-lampiran tersebut dapat dilihat bahwa sumber dan penggunaan dana yang di dapat oleh BMH Surabaya didistribusikan terpisah sesuai dengan jenisnya. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan ajaran syari'ah.

Adapun laporan aktivitas, memang secara kontekstual pada BMH Surabaya tidak dijumpai, Namun terdapat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (LSPD) yang isinya tidak jauh berbeda dengan laporan aktivitas. Hal ini bisa dikatakan bahwa pada BMH Surabaya Laporan aktivitas sebenarnya ada, hanya saja dikenal dengan istilah LSPD.

Sementara laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan BMH Surabaya masih belum diterapkan. Memang pada awal berdiri hingga periode 2005 BMH Surabaya sudah menerapkan Laporan Arus Kas. Tetapi setelah periode tersebut Laporan Arus Kas tidak disajikan karena LSPD dianggap sudah memadai dan mewakili laporan tersebut. Disamping itu juga agar penggunaan sistem laporan menjadi simpel dan mudah.

Catatan atas laporan keuangan BMH Surabaya tidak disajikan karena untuk informasi-informasi dan kebijakan sudah diatur tersendiri dalam Standar Operasional Perusahaan (SOP). Sedangkan informasi-informasi yang tidak diatur dalam kebijakan akuntansi misalnya berupa pengesahan terhadap batas maksimal pengeluaran (biaya) dan sebagainya, maka informasi pengesahan tersebut cukup diungkap pada saat presentasi (rapat).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi pada BMH Surabaya yakni *measurement, recognition*, dan *disclosure* sudah cukup memadai dan sudah mempunyai acuan yaitu diatur dalam kebijakan akuntansi yang telah dibuat dalam Forum Zakat (FOZ) dengan dasar akuntansi yang tetap mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan.
2. Realisasi terhadap penyajian atau pengungkapan pelaporan keuangan BMH Surabaya periode 2007 hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan dan laporan sumber dan penggunaan dana (LSPD), sedangkan dalam pelaporan keuangan PSAK No.45 terdapat empat jenis laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan (neraca), Laporan Aktivitas, Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan.
3. Penyajian laporan posisi keuangan BMH Surabaya sudah cukup sesuai dengan PSAK No. 45, yaitu menyajikan informasi tentang aset dan kewajiban, hanya saja perbedaannya adalah penyajian aktiva bersih terikat maupun tidak terikat tidak dikenal dan yang ada hanya penyajian saldo dana yang merupakan sumber pendapatan yang berasal dari sumbangan-sumbangan.
4. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana BMH Surabaya pada intinya merupakan laporan aktivitas yang didalamnya menjelaskan tentang pengaruh transaksi terserta penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Hanya saja penamaannya yang berbeda.
5. Laporan arus kas tidak disajikan karena LSPD dianggap sudah memadai dan hal itu untuk lebih mempersimpel penggunaan sistem.
6. Catatan atas laporan keuangan tidak disajikan karena segala kebijakan sudah diatur diantaranya juga diatur dalam Standar Operasional Perusahaan (SOP), hanya saja informasi-informasi tentang persetujuan ataupun keputusan yang tidak ada dalam kebijakan dan SOP organisasi sudah disahkan diungkap dan dilampirkan pada saat presentasi.

Saran

1. Komponen pelaporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) termasuk didalamnya adalah BMH Surabaya terdapat laporan keuangan utama yaitu

- laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, sebaiknya dalam penerapannya BMH Surabaya menyajikan keempat laporan keuangan tersebut karena sudah sesuai dengan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.
2. Laporan arus kas sebaiknya disajikan kembali untuk mengetahui informasi perputaran keluar masuknya kas.
 3. Catatan atas laporan keuangan seharusnya disajikan untuk memberikana informasi tentang hal-hal yang tidak diungkap dalam laporan posisi keuangan dan LSPD seperti penjelasan atau perincian tentang biaya-biaya dibayar dimuka, penjelasan mengenai aktiva tetap, penjelasan mengenai aktiva lain-lain, informasi tentang kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk diungkapkan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar. 2005. *Akuntansi Syari'ah; Arah, Prospek, & Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press.
- Al-Qur'an
- Budiman, Budi. 2002. *Potensi Dana ZIS Sebagai Instrumen Ekonomi Islam; Dari Teori dan Implementasi manajemennya*. *Proceeding Simposium Nasional 1 Ekonomi Islam*. Yogyakarta: P3EIFEUII.
- Budiyanto, Dody. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen dan Operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat*. *Media Akuntansi Edisi 57/ Tahun XII/ Oktober 2006*.
- Cahyono, Dwi, Azizah Kholis, dan Bambang Satriawan. 2002. *Penerapan Akuntansi Syari'ah dan Akuntabilitas Keuangan Pada Masjid-Masjid (Study Kasus Di Masjid-Masjid Kertamadya Semarang)*. *Proceeding Simposium Nasional 1 Ekonomi Islam*. Yogyakarta: P3EIFEUII.
- Ciunie, Tang Anita. 2003. *Pengaruh Penerapan PSAK No. 45 Mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Laporan Keuangan organisasi Nirlaba Pada Evaluasi Kinerja Organisasi (study kasus pada LSM "X")*. Surabaya: UNAIR. Tidak dipublikasikan.
- Damayanti, Rita. 2004. *Penilaian Kinerja Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Study Kasus Pada Yayasan Dana Sosial Alfalalah Surabaya)*. Surabaya: UNAIR. Tidak dipublikasikan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan Per September 2007*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis; Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFPE.
- Harahap, Sofyan Safri. 2004. *Akuntansi Islam*. Jalarta: Bumi Aksara.
[Http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_nirlaba](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_nirlaba). Diakses 8 mei 2008
[Http://infowakaf.net/?Sekilas_Tentang_Wakaf](http://infowakaf.net/?Sekilas_Tentang_Wakaf). Diakses 22 Mei 2008
- Kieso, Donald E, Jerry j. Weygant dan Terry D. Warfield. 2002. *Akuntansi Intermediate edisi kesepuluh*. Jakarta: Erlangga.
- Ludigdo, Unti, dan Agustiningtyas Marini. 2003. *Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh: Prospek Sebagai Pilar Pencapaian Kemakmuran Masyarakat (Kasus Kabupaten Trenggalek)*. *Lintasan Ekonomi Vol.XX, No.1: 69*

- Mayasari, Valeria Cristine. 2004. *Penerapan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Dalam Menyusun Laporan Keuangan Yayasan Lembaga Karya Dharma*. Surabaya: UNAIR. Tidak dipublikasikan.
- Moleong, lexy j. 2005. *Metodologi peneltian Kualitatif.Edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2005. *Metode Penelitia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Samdin. 2002. Pengembangan Manajemen BAZI. *Proceeding Simposium Nasional 1 Ekonomi Islam*. Yogyakarta: P3EIFEUII.
- Setiawan, Adi. 2008. <http://www.bddn.org/index.php?option=com>. Diakses 22 Mei 2008.
- Subiyanto, Ibnu. 2000. *Metodologi Penelitian; Manajemen dan Akuntansi*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi,Edisi2*. Yogyakarta: Ekonisia.
- _____. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Susanto, Akhmad Akbar dan Malik Cahyadin. 2008. Praktek Ekonomi Islam di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Perekonomia. *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah*. Vol.5: 75.
- Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi; Perencanaan Pelaporan Keuangan;Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Syafei, Ermi Suhasti. 2002. *Mengoptimalkan Potensi Zakat*. *Proceeding Simposium Nasional 1 Ekonomi Islam*. Yogyakarta: P3EIFEUII.
- Syahatah, Husayn. 2004. *Akuntansi Zakat; Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Syarifuddin. 2003. <http://Www.Pkpu.Or.Id/Berita.Php?Id>, Diakses 22 Mei 2008
- Tohirin, Achmad. 2002. *Kontribusi Pengembangan Wakaf (Tunai) Di Indonesia*. *Proceeding Simposium Nasional 1 Ekonomi Islam*. Yogyakarta: P3EIFEUII.

LAMPIRAN

Tabel 4.3

Perbandingan Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 45 dengan BMH Surabaya

Pelaporan Keuangan berdasarkan PSAK No. 45	Pelaporan Keuangan Pada BMH Surabaya	Keterangan
1. Laporan Posisi Keuangan	1. Laporan Posisi Keuangan	Menyajikan informasi aset, kewajiban dan saldo dana. Hal ini tidak jauh berbeda dengan PSAK No.45, hanya saja perbedaanya adalah penyajian aktiva bersih terikat maupun tidak terikat tidak dikenal yang ada hanya penyajian saldo dana yang merupakan sumber pendapatan yaitu sumbangan-sumbangan.

Lanjutan Tabel 4.3

Aset: Kas dan setara kas Piutang Bunga Persediaan dan biaya dibayar dimuka Piutang Lain-lain Investasi lancar Aset terkait untuk investasi dalam tanah, bangunan dan peralatan Tanah, Bangunan dan peralatan Investasi jangka panjang	Aktiva : <u>Aktiva lancar :</u> Kas dan Setara Kas Bank Piutang Jaminan Bank Barang Berharga Sewa dibayar dimuka Total aktiva lancar <u>Aktiva tetap</u> Tanah Bangunan Kendaraan Investasi Kantor Akumulasi Penyusutan Total aktiva tetap	Aktiva disajikan tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam PSAK yaitu disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas.
Jumlah Aset	Total Aktiva	Penyajian total aktiva merupakan kalkulasi aktiva baik aktiva lancar maupun aktiva tetap.
Pelaporan Keuangan berdasarkan PSAK No. 45	Pelaporan Keuangan Pada BMH Surabaya	Keterangan
Kewajiban dan Aset bersih Utang dagang Pendapatan diterima dimuka yang dapat dikembalikan Utang Lain-lain Utang wesel Kewajiban Tahunan Utang jangka panjang Jumlah Kewajiban	KEWAJIBAN Hutang pada pihak ketiga Hutang lain-lain Total Kewajiban	Penyajian kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya . hal ini sudah sesuai dengan PSAK yang ada.
Aset bersih Tidak terikat Terikat temporer (catatan B) Terikat permanen (catatan C) Jumlah Aset bersih	SALDO DANA Saldo Dana zakat Saldo dana infaq dan shadaqah Saldo dana pengelola Saldo dana dikhususkan Saldo dana non syaria,ah Saldo dana wakaf Penyaluran terakumulasi pada aktiva (Saldo Dana Termanfaatkan) Total Saldo Dana	Saldo dana disajikan sebagai suatu modal yang bersumber dari sumbangan-sumbangan yakni merupakan kalkulasi dari saldo dana zakat, infaq, shadaqah serta wakaf dan lain-lain. Dalam hal ini saldo dana tidak disajikan sebagai aset bersih yang meliputi aset tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen, karena disesuaikan dengan klasifikasi dana yang dikhususkan, yakni sesuai dengan ketentuan penggunaan

Jumlah kewajiban dan aset bersih	Total Kewajiban dan Saldo Dana	Akun ini menyajikan jumlah total antara kewajiban dengan saldo dana yang ada.
2. Laporan Aktivitas	2. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana	LSPD pada intinya menyajikan informasi yang tidak jauh beda dengan laporan aktivitas dalam PSAK, perbedaannya hanya terletak pada penamaannya saja, namun isinya juga menjelaskan tentang pengaruh transaksi terserta penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
	Sumber Dana Bagi Hasil Bank Syari'ah Infaq Donatur Rutin Infaq Donatur Rutin Infaq Insidental Infaq Kotak Pengembalian piutang Total sumber dana	Akun ini disajikan karena merupakan akun yang memberikan gambaran sumber-sumber pemasukan kas yang ada untuk digunakan dalam menjalankan program yaitu merupakan dari pendapatann yang ada.
Pelaporan Keuangan berdasarkan PSAK No. 45	Pelaporan Keuangan Pada BMH Surabaya	Keterangan
Beban dan kerugian	Penggunaan Dana	Penyajian ini menyajikan akun-akun biaya-biaya atau pengeluaran yang terjadi.
	Lain-Lain Adminstrasi Bank Syariah Bunga Kredit	Merupakan penggunaan dana untuk kepentingan lain-lain diluar program kegiatan rutin yang sudah direncanakan. Agar penyajian ini sesuai dengan PSAK seharusnya penyajiaannya di lakukan setelah program kegiatan utama dilaksanakan.
Program A Program B Program C	Beasiswa <u>Beasiswa</u> Beasiswa kader da'i Beasiswa prestasi <u>Sahabat Guru</u> Pelatihan guru	Penyajiaannya tidak jauh berbeda dengan PSAK yaitu program-program kegiatan utama yang diselenggarakan

Tabel 4.1
Format Laporan Posisi Keuangan BMH Surabaya

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH		
LAPORAN NERACA KONSOLIDASI		
Per 31 Desember 200X		
AKTIVA		
Aktiva Lancar		
Kas dan Setara Kas	XXX	
Bank	XXX	
Piutang	XXX	
Jaminan Bank	XXX	
Barang Berharga	XXX	
Sewa Dibayar Dimuka	XXX	
Total Aktiva Lancar		XXX
Aktiva Tetap		
Tanah	XXX	
Bangunan	XXX	
Kendaraan	XXX	
Inventaris Kantor	XXX	
Akumulasi Penyusutan	XXX	
Total Aktiva Tetap		XXX
Total Aktiva		XXX
KEWAJIBAN		
Hutang pada Pihak Ketiga	XXX	
Hutang Lain-lain	XXX	
Total Kewajiban		XXX
SALDO DANA		
Saldo Dana Zakat	XXX	
Saldo Dana Infaq Shadaqah	XXX	
Saldo Dana Pengelola	XXX	
Saldo Dana Dikhususkan	XXX	
Saldo Dana Non Syariah	XXX	
Saldo Dana Wakaf	XXX	
Penyaluran Terakumulasi pada Aktiva (dana termanfaatkan)	XXX	
Total Saldo Dana		XXX
Total Kewajiban dan Saldo Dana		XXX

Sumber: BMH Surabaya

Tabel 4.2
Format Laporan Sumber dan penggunaan Dana BMH Surabaya

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH		
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA		
Per 31 Desember 200X		
Sumber Dana	XXX	
Bagi Hasil Bank Syariah	XXX	
Infaq Donatur Rutin	XXX	
Infaq Insidental	XXX	
Infaq Kotak	XXX	
Pengembalian Piutang	XXX	
Total Sumber Dana		XXX
Penggunaan Dana		
Lain-Lain		
Adminstrasi Bank Syariah	XXX	
Bunga Kredit	XXX	
Beasiswa	XXX	
Beasiswa Kader Dai	XXX	
Beasiswa Prestasi	XXX	
<u>Sahabat Guru</u>		
Pelatihan Guru	XXX	
Dai Membangun Negeri (DAMBAAN)	XXX	
Biaya Pengelolaan Program Dakwah	XXX	
Bina Desa Sejahtera (BINDERA)	XXX	
Bina Muallaf	XXX	
Kuliah Dai Mandiri	XXX	
<u>Peduli Dai</u>		
Natura Dai	XXX	
Sarana Dai	XXX	
Pendanaan	XXX	
Pembayaran Pinjaman	XXX	
Pemberian Pinjaman	XXX	
Sapa GAKIN		
<u>Sapa GAKIN</u>		
Santunan Gakin	XXX	
<u>Sidak Sehat</u>		
Bantuan Pengobatan	XXX	
Mobil Klinik	XXX	
PPAS	XXX	
Total Penggunaan Dana		XXX
Surplus (Defisit)		XXX
Transfer Dana		
Transfer ke Dana Pengelola	XXX	
Total Transfer Dana		XXX
Saldo Awal		XXX
Saldo Akhir		XXX

Sumber: BMH Surabaya